

# Implementasi Model Ekonomi Berbasis Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Mewujudkan Visi Asta Cita Presiden di Desa Tertinggal

Nursam<sup>1</sup>, Mohammad Sawir<sup>2\*</sup>, Mudatsir<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Madako Tolitoli, Indonesia; [nursam012@gmail.com](mailto:nursam012@gmail.com)

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Madako Tolitoli, Indonesia; [moh.sawir@umada.ac.id](mailto:moh.sawir@umada.ac.id)

<sup>3</sup> Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin Tolitoli, Indonesia; [mudatsir@stiemujahidin.ac.id](mailto:mudatsir@stiemujahidin.ac.id)

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas penerapan model ekonomi berbasis komunitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Urgensi penelitian ini didasarkan pada rendahnya pemanfaatan Dana Desa yang masih dominan pada pembangunan fisik dibanding pemberdayaan ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR), dengan melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan masyarakat sebagai subjek aktif. Data dikumpulkan melalui Focus Group Discussion (FGD), wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dari 42% menjadi 71% setelah penerapan model. Implementasi pilot project usaha pengolahan hasil pertanian meningkatkan pendapatan anggota sebesar 17%. Faktor pendukung meliputi komitmen pemerintah desa, potensi sumber daya alam, dan dukungan regulasi. Hambatan utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, akses pasar, serta rendahnya literasi manajerial. Kesimpulannya, model ekonomi berbasis komunitas terbukti meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa dan dapat direplikasi pada desa lain dengan karakteristik serupa.

**Keywords:** Dana Desa; Ekonomi Komunitas; Pemberdayaan Masyarakat; Kemandirian Desa; Pembangunan Partisipatif

DOI: <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v6i2.444>

\*Correspondensi: Mohammad Sawir

Email: [moh.sawir@umada.ac.id](mailto:moh.sawir@umada.ac.id)

Received: 15-04-2026

Accepted: 21-04-2026

Published: 22-04-2026



**Copyright:** © 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

and regulatory support. Conversely, major constraints consist of limited human resource capacity, restricted market access, and low managerial literacy. In conclusion, the community-based economic model has proven effective in enhancing Village Fund management and household economic independence, and it has the potential to be replicated in other villages with similar socio-economic characteristics.

**Keywords:** Village Fund; Community Economy; Community Empowerment; Village Self-Reliance; Participatory Development

## Pendahuluan

Pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan yang merata, meningkatkan kesejahteraan, serta mewujudkan kemandirian desa secara berkelanjutan. Kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2025 menekankan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan desa digital, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa (BPKP, 2025; Sagara, 2025). Namun, dalam implementasinya, khususnya pada desa belum berkembang, pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kapasitas aparatur desa, minimnya partisipasi masyarakat, serta dominasi penggunaan dana pada pembangunan fisik yang belum diimbangi dengan program pemberdayaan ekonomi (Safar; et al., 2024; Saputra; & Manjaleni; 2025). Kondisi ini menyebabkan potensi Dana Desa belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif teori pembangunan, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan pendekatan *community driven development* yang menekankan partisipasi masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan (Mccarthy et al., 2017). Selain itu, menurut teori *local economic development*, pembangunan ekonomi lokal akan efektif apabila berbasis pada potensi sumber daya setempat serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses produksi dan distribusi (Windari, 2021). Artinya, kegagalan memaksimalkan Dana Desa bukan hanya persoalan tata kelola administratif, tetapi juga lemahnya integrasi antara kebijakan fiskal desa dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Di sisi lain, Kabupaten Tolitoli memiliki potensi sumber daya lokal yang cukup besar di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, namun masih dihadapkan pada ketimpangan pembangunan antar desa serta keterbatasan akses terhadap sumber daya dan layanan publik (Nursam; et al., 2024; Yahya, 2024). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang lebih partisipatif dan berkelanjutan, salah satunya melalui penerapan model ekonomi berbasis komunitas yang menekankan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola potensi lokal secara mandiri (Ingkiat; et al., 2022; Windari, 2021). Pendekatan ini sejalan dengan konsep *community based development* yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan sekaligus penggerak utama perubahan sosial ekonomi (Adiansah et al., 2021).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa sebagian besar berfokus pada aspek efektivitas kebijakan, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta kompetensi sumber daya manusia. Beberapa studi menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan Dana Desa (Liani & Takari, 2024). Selain itu, terdapat pula penelitian yang mengkaji pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan pembangunan berbasis komunitas yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi lokal. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih memisahkan antara aspek tata kelola Dana Desa dan pendekatan ekonomi berbasis komunitas, sehingga belum memberikan model integratif

yang mampu menghubungkan pengelolaan keuangan desa dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara langsung (Suharnanik & Km, 2023).

Beberapa peneliti fokus pada peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan Dana Desa melalui pendekatan administratif dan kelembagaan. Ada penelitian yang fokusnya hanya terbatas pada partisipasi masyarakat tanpa mengintegrasikan model ekonomi berbasis komunitas dalam sistem pengelolaan Dana Desa secara menyeluruh (Liani & Takari, 2024; Mccarthy et al., 2017). Selain itu, penelitian terkait pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas umumnya lebih menekankan pada aspek pengembangan sosial dan ekonomi lokal tanpa mengaitkannya secara langsung dengan instrumen kebijakan Dana Desa sebagai sumber pembiayaan utama. Bahkan, masih sangat terbatas penelitian yang secara spesifik mengkaji integrasi model ekonomi berbasis komunitas dalam pengelolaan Dana Desa pada desa belum berkembang sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi sekaligus menjawab agenda pembangunan nasional seperti Asta Cita Presiden (Prabowo; & Gibran, 2024).

Secara teoretis, integrasi tersebut penting karena pengelolaan Dana Desa tidak hanya harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik, tetapi juga mampu menciptakan *economic value creation* melalui pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori *participatory governance* yang menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan akan meningkatkan efektivitas kebijakan serta keberlanjutan program pembangunan (Wallerstein & Duran, 2010). Dengan demikian, penggabungan antara tata kelola keuangan desa dan model ekonomi berbasis komunitas menjadi kebutuhan konseptual sekaligus praktis dalam pembangunan desa.

Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengintegrasikan model ekonomi berbasis komunitas ke dalam pengelolaan Dana Desa secara partisipatif dan berbasis potensi lokal di Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. State of the art penelitian ini terletak pada upaya menggabungkan pendekatan tata kelola Dana Desa dengan model pemberdayaan ekonomi komunitas dalam satu kerangka implementatif. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada: (1) integrasi langsung model ekonomi berbasis komunitas dalam sistem pengelolaan Dana Desa, (2) fokus pada desa belum berkembang yang selama ini relatif kurang mendapat perhatian dalam penelitian, serta (3) penggunaan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (Adiansah et al., 2021). Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta model pengelolaan Dana Desa yang tidak hanya akuntabel secara administratif, tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas penerapan model ekonomi berbasis komunitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya sebagai upaya mendukung pencapaian Asta Cita Presiden dalam membangun Indonesia dari pinggiran.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Participatory Action Research (PAR). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan penelitian, mulai dari identifikasi masalah, perancangan model, implementasi, hingga evaluasi secara kolaboratif (Adiansah et al., 2021). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus pada Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, guna memperoleh pemahaman yang mendalam terkait implementasi model ekonomi berbasis komunitas dalam pengelolaan Dana Desa. Pendekatan PAR dinilai efektif dalam konteks pemberdayaan masyarakat karena mengintegrasikan proses penelitian dengan tindakan nyata untuk perubahan sosial yang berkelanjutan (Najamudin; & Fajar, 2024). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tende, yang meliputi perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), kelompok masyarakat, serta masyarakat penerima manfaat program Dana Desa (Safar; et al., 2024). Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu seperti keterlibatan, pengalaman, dan pemahaman terhadap pengelolaan Dana Desa (Kasih & Astawa, 2023).

Penelitian ini menerapkan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang bersifat siklus dan partisipatif. Prosedur penelitian dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Potensi dan Masalah, dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam untuk menggali kondisi eksisting pengelolaan Dana Desa, potensi ekonomi lokal, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
2. Perancangan dan Evaluasi Model, peneliti bersama masyarakat merancang dan mengevaluasi model ekonomi berbasis komunitas yang sesuai dengan kondisi lokal.
3. Pelaksanaan Pilot Project, model yang telah dirancang diuji coba dalam skala terbatas untuk melihat efektivitas implementasinya dalam pengelolaan Dana Desa.
4. Monitoring dan Evaluasi, dilakukan observasi partisipatif untuk menilai tingkat partisipasi masyarakat, efektivitas program, serta dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
5. Refleksi dan Penyempurnaan Model, berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan perbaikan. Pendekatan ini memungkinkan adanya proses pembelajaran bersama antara peneliti dan masyarakat serta menghasilkan model yang kontekstual dan adaptif terhadap kondisi lokal (Adiansah et al., 2021).

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk mendukung pendekatan kualitatif partisipatif melalui teknik pengumpulan data yang beragam dan saling melengkapi. Instrumen utama berupa pedoman wawancara mendalam yang disusun secara semi-terstruktur untuk menggali informasi terkait pengalaman, persepsi, serta evaluasi para informan terhadap pengelolaan Dana Desa dan penerapan model ekonomi berbasis komunitas. Selain itu, digunakan panduan Focus Group Discussion (FGD) yang berfungsi untuk memfasilitasi diskusi kelompok dalam mengidentifikasi

potensi lokal, permasalahan, serta merumuskan solusi berbasis partisipasi masyarakat (Adiansah et al., 2021; Kasih & Astawa, 2023). Untuk memperkuat data empiris, penelitian ini juga menggunakan lembar observasi partisipatif yang memungkinkan peneliti mengamati secara langsung dinamika pelaksanaan program, interaksi antar pemangku kepentingan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi berbasis komunitas.

Di samping itu, dokumentasi menjadi instrumen pendukung yang penting, meliputi pengumpulan data sekunder seperti RPJMDes, RKPDDes, laporan keuangan desa, serta dokumen lain yang relevan dengan pengelolaan Dana Desa (Safar; et al., 2024). Seluruh instrumen dalam penelitian ini dikembangkan dengan mengacu pada kebutuhan penelitian dan sebagian merupakan adaptasi dari penelitian terdahulu yang relevan, sehingga memiliki dasar konseptual yang kuat. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas (trustworthiness), dilakukan triangulasi sumber dan metode, member check kepada informan, serta pencatatan proses penelitian secara sistematis (audit trail) guna memastikan konsistensi dan kredibilitas data yang diperoleh (Najamudin; & Fajar, 2024). Proses analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik kualitatif, yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan tema-tema utama yang muncul dari data secara sistematis dan partisipatif.

## Hasil dan Pembahasan

Penelitian yang dilaksanakan di Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli pada tahun 2025 berhasil menunjukkan capaian yang signifikan dalam *implementasi Community Based Economic Model (CBEM)*. Pada tahap awal penelitian dilakukan *Focus Group Discussion (FGD)* sebagai metode pengumpulan data partisipatif untuk mengidentifikasi kondisi tata kelola, tingkat partisipasi, serta potensi ekonomi lokal sebagai dasar perencanaan model (Adiansah et al., 2021). Temuan utama menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dari 42% menjadi 71% setelah penerapan model partisipatif. Perubahan ini memperlihatkan transformasi pola tata kelola Dana Desa, dari sistem yang sebelumnya bersifat top-down dan didominasi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), menuju sistem kolaboratif yang lebih inklusif dan akuntabel. Hasil ini sejalan dengan temuan yang menegaskan bahwa deliberasi inklusif di tingkat desa berkontribusi pada peningkatan responsivitas kebijakan dan pemerataan alokasi sumber daya (Liani & Takari, 2024).

**Tabel 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa**

| No | Indikator                           | Sebelum Penerapan Model | Setelah Penerapan Model          | Perubahan/Peningkatan      |
|----|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1  | Tingkat Partisipasi Musyawarah Desa | 42%                     | 71%                              | 29%                        |
| 2  | Peran Masyarakat dalam Pembangunan  | Pasif (didominasi TPK)  | Aktif sebagai subjek pembangunan | Transformasi peran         |
| 3  | Pola Tata Kelola Dana Desa          | Sentralistik, top-down  | Kolaboratif, partisipatif        | Lebih inklusif & akuntabel |

(Sumber: Data primer, 2025)

Selain aspek partisipasi, penelitian juga menguji dampak ekonomi melalui proyek percontohan pengolahan hasil pertanian. Kegiatan ini berhasil meningkatkan rata-rata pendapatan rumah tangga anggota sebesar 17%, membuktikan bahwa pengelolaan berbasis komunitas dapat memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan ekonomi, sebagaimana dikemukakan pada penelitian sebelumnya bahwa pemberdayaan berbasis potensi lokal mampu meningkatkan kesejahteraan warga (Najamudin; & Fajar, 2024).

**Tabel 2. Peningkatan Kemandirian Ekonomi melalui Kelompok Usaha**

| No | Indikator                    | Sebelum Model                   | Setelah Model                                       | Perubahan/Peningkatan                  |
|----|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 1  | Pendapatan Rata-rata Anggota | Belum ada usaha produktif       | +17% dari baseline pendapatan                       | Meningkat signifikan                   |
| 2  | Pemanfaatan Dana Desa        | Dominan untuk pembangunan fisik | Dialokasikan untuk usaha pengolahan hasil pertanian | Lebih produktif & berorientasi ekonomi |
| 3  | Dampak Ekonomi Rumah Tangga  | Tidak ada tambahan pendapatan   | Pendapatan tambahan dari usaha kolektif             | Meningkatkan kesejahteraan keluarga    |

(Sumber: Data primer, 2025)

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan yang dapat mengganggu keberlanjutan program. Rendahnya literasi manajerial dan keterampilan kewirausahaan masyarakat menjadi tantangan utama, sebagaimana diungkapkan bahwa partisipasi yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan kapasitas masyarakat untuk mengelola kegiatan ekonomi. Selain itu, keterbatasan akses pasar menjadi kendala signifikan dalam memperluas jangkauan produk komunitas (Kasih & Astawa, 2023).

**Tabel 3. Faktor Pendukung dan Hambatan Implementasi Model**

| No | Kategori         | Hasil Penelitian (Temuan Lapangan)  | Implikasi  |
|----|------------------|---|--|
| 1  | Faktor Pendukung | Komitmen Pemdes; Potensi pertanian dan perikanan; Dukungan regulasi desa & nasional; Arah kebijakan pembangunan kabupaten | Menjadi pilar keberhasilan & peluang replikasi   |
| 2  | Faktor Hambatan  | Literasi manajerial rendah; Akses pasar terbatas  | Perlu intervensi pelatihan & perluasan pemasaran |

(Sumber: Data primer, 2025)

Untuk memperjelas capaian partisipasi masyarakat dan peningkatan pendapatan rumah tangga, berikut gambaran perbandingan kondisi sebelum dan sesudah penerapan CBEM di Desa Tende.



**Gambar 1. Peningkatan Partisipasi dan Pendapatan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Penarapan CBEM di Desa Tende**

Model Ekonomi Berbasis Komunitas yang dikembangkan dalam penelitian ini, yaitu Model Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Berbasis Dana Desa untuk Desa Belum Berkembang, merupakan pendekatan pemberdayaan yang menempatkan kelompok usaha desa sebagai pengelola utama kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal, sejalan dengan prinsip pengembangan ekonomi lokal berbasis produksi di pedesaan. Dukungan alokasi Dana Desa minimal 20% untuk usaha produktif konsisten dengan prioritas nasional yang menekankan efisiensi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa (Maharani; et al., 2023; Marwa, 2025). Model ini dijalankan melalui kemitraan antara pemerintah desa, BPD, kelompok usaha, UMKM pendukung, serta LPPM Universitas Madako Tolitoli dengan rantai produksi terintegrasi mulai dari pemanfaatan hasil pertanian hingga pemasaran produk, sebagaimana praktik pembangunan komunitas yang menekankan kolaborasi multipihak. Penguatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan manajemen usaha dan literasi keuangan yang terbukti sebagai faktor penentu

keberhasilan peningkatan kesejahteraan desa. Model ini telah diuji melalui pilot project usaha pengolahan hasil pertanian dan menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan desa (Liani & Takari, 2024; Najamudin; & Fajar, 2024).



**Gamabr 2. Rancangan Model Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Berbasis Dana Desa Tende**

Selanjutnya dilaksanakan uji publik melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan 27 peserta terdiri atas unsur pemerintah desa, BPD, TPK, tokoh masyarakat, petani, dan pemuda dengan metode diskusi terbuka, pemungutan suara penentuan usaha prioritas, serta pemetaan tantangan pemasaran. Pelibatan masyarakat secara langsung dalam perencanaan pembangunan terbukti meningkatkan rasa kepemilikan dan efektivitas hasil program (Nursam; et al., 2024; Wallerstein & Duran, 2010). Hasil FGD menunjukkan bahwa usaha pengolahan hasil pertanian ditetapkan sebagai prioritas karena dinilai paling potensial meningkatkan pendapatan masyarakat, sejalan dengan temuan bahwa pemanfaatan potensi pertanian lokal mampu memperkuat ketahanan ekonomi desa. Isu penting yang muncul meliputi keterbatasan akses pasar, kualitas produk, serta kebutuhan pendampingan berkelanjutan, sementara pemuda desa menyampaikan aspirasi keterlibatan dalam pemasaran digital untuk memperluas pangsa pasar hal ini sesuai dengan arah transformasi desa digital yang sedang dicanangkan secara nasional (Sagara, 2025). Dengan demikian, FGD menghasilkan kesepakatan bersama untuk memperkuat implementasi pilot project sebagai fondasi keberlanjutan model ekonomi komunitas di Desa Tende.



**Gambar 3. Pilar Keberhasilan Pilot Project Pengelolaan Pertanian melalui Focus Group Discussion (FGD)**

Berdasarkan hasil penelitian, dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan konkret bagi Pemerintah Desa Tende. Pertama, pengalokasian minimal 20% Dana Desa untuk usaha produktif berbasis komunitas setiap tahun guna mendorong kemandirian ekonomi, sebagaimana diarahkan kebijakan pembangunan desa nasional. Kedua, perlunya pembentukan Unit Manajemen Usaha Desa yang melibatkan pemuda dan perempuan agar tata kelola usaha menjadi lebih inklusif dan adaptif. Ketiga, pelatihan manajemen usaha dan pemasaran digital secara rutin setiap semester untuk memperkuat kapasitas kewirausahaan masyarakat desa. Selain itu, ditetapkan penyusunan standar mutu produk dan SOP produksi untuk menjamin kontinuitas dan daya saing hasil usaha, serta kemitraan strategis dengan Dinas Perdagangan dan Koperasi guna memperluas akses pasar. Terakhir, diperlukan insentif berbasis kinerja melalui mekanisme profit-sharing untuk meningkatkan motivasi anggota kelompok usaha sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan ekonomi komunitas (Liani & Takari, 2024; Najamudin; & Fajar, 2024).



**Gambar 4. Siklus Keberlanjutan Ekonomi Komunitas Desa Tende**

Implementasi CBEM di Desa Tende terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan pendapatan rumah tangga melalui usaha pengolahan hasil pertanian, sekaligus mengubah tata kelola Dana Desa menjadi lebih inklusif dan partisipatif. Meskipun demikian, keberlanjutan ekonomi komunitas masih memerlukan penguatan kapasitas SDM dan optimalisasi akses pasar agar dampak pembangunan desa dapat terus bertumbuh dan berkelanjutan (Kwon et al., 2022).

## Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Community Based Economic Model (CBEM) dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemandirian ekonomi desa. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dari 42% menjadi 71% mencerminkan adanya transformasi tata kelola dari sistem yang bersifat top-down menuju pendekatan yang lebih partisipatif, inklusif, dan akuntabel. Selain itu, implementasi model melalui pilot project usaha pengolahan hasil pertanian mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga sebesar 17%, yang menunjukkan bahwa integrasi Dana Desa dengan model ekonomi berbasis komunitas dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Model ini juga berhasil menggeser orientasi penggunaan Dana Desa dari dominasi pembangunan fisik menuju pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan. Namun demikian, keberhasilan implementasi model masih menghadapi beberapa kendala, terutama pada aspek kapasitas sumber daya manusia dan keterbatasan akses pasar. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang tinggi perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas manajerial, kewirausahaan, serta dukungan jaringan pemasaran agar keberlanjutan model dapat terjamin. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa model ekonomi berbasis komunitas merupakan pendekatan yang relevan dan strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa, khususnya di desa belum berkembang. Model ini tidak hanya meningkatkan efektivitas tata kelola, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa serta mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional, khususnya Asta Cita Presiden dalam membangun Indonesia dari pinggiran.

## Daftar Pustaka

- Adiansah, W., Nulhaqim, S. A., & Basyar, G. G. K. (2021). Resolusi Konflik Berbasis Komunitas Melalui Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Alternatif Resolusi Konflik Agraria. *Share : Social Work Journal*, 10(2), 163. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31200>
- BPKP. (2025). *Agenda prioritas 2025 Mengawal Kemandirian Bangsa* (BPKP (ed.); BPKP). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Ingkiat, R., Astuti, D. D., & Fansuri, H. (2022). Efektivitas Dan Efisiensi Dana Desa (Dd) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa Di Desa Lebeng Barat

- Kabupaten Sumenep. *Jakuma : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan*, 03(01), 64–77.
- Kasih, N. N., & Astawa, I. N. W. (2023). Kesejahteraan Masyarakat Desa Kabupaten Tabanan. *Journal Ilmiah Rinjani (JIR)*, 11(1), 11–19.
- Kwon, J., Squires, H., Franklin, M., Lee, Y., & Young, T. (2022). Economic models of community-based falls prevention: a systematic review with subsequent commissioning and methodological recommendations. *BMC Health Services Research*, 22(1), 1–36. <https://doi.org/10.1186/s12913-022-07647-6>
- Liani, Y., & Takari, D. (2024). Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(11).
- Maharani, W., Vebryan, A., & Atmalqi, A. (2023). *Profil Industri Mikro dan Kecil Kabupaten Tolitoli 2021* (W. Maharani (ed.); Aldi Atmal). Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli.
- Marwa, M. (2025). *Efisiensi Dana Desa Memacu Kemandirian Desa*. DJPD Kementerian Keuangan RI. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/palopo/id/data-publikasi/189-berita/2929-efisiensi-dana-desa-memacu-kemandirian-desa.html#:~:text=Diharapkan Dana Desa yang telah,desa-desa menjadi lebih mandiri.>
- Mccarthy, J. F., Steenbergen, D. J., Warren, C., Acciaoli, G., Baker, G., Lucas, A., & Rambe, V. (2017). Community Driven Development and Structural Disadvantage: Interrogating the Social Turn in Development Programming in Indonesia. *Journal of Development Studies*, 53(12), 1988–2004. <https://doi.org/10.1080/00220388.2016.1262024>
- Najamudin, F., & Fajar, A. H. Al. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal Melalui Pendekatan Abcd Untuk Mencapai SDG 1 : Tanpa Kemiskinan Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7(2), 142–158. <https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.58936>
- Nursam, Sawir, M., Kahar, A., Nuraini, A., & Iqbal, M. (2024). Peningkatan Pemahaman Tentang Partisipasi Keluarga Penerima Manfaat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 06–09.
- Prabowo, & Gibran. (2024). *Asta Cipta Presiden 2024*. Sekretaris Kepresidenan RI.
- Safar, A. W., Dawai, A. S. S., & Nursam. (2024). The Implementation Of The Village Fund In An Underdeveloped Village: A Case Study Of Tende Village, Galang Sub-District, Tolitoli Regency. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 9(2), 179–195.
- Sagara, W. R. D. (2025). *Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa 2025: Fokus Pada Pemberdayaan Ekonomi Dan Implementasi Desa Digital*. Website Resmi Desa Sagara. <https://sagara.desaa.id/artikel/1655-skala-prioritas-penggunaan-dana-desa-2025-fokus-pada-pemberdayaan-ekonomi-dan-implementasi-desa-digital>
- Saputra, S. A., & Manjaleni; (2025). *Pengaruh Alokasi Dana Desa , Kebijakan Desa , dan Badan*

---

*Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Karyalaksana Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung Abstrak. 11(2), 849–857.*

- Suharnanik, S., & Km, M. S. (2023). *Buku Ajar Pengembangan Komunitas* (Y. Popiyanto (ed.); Yudha Popi). UWKS PRESS.
- Wallerstein, N., & Duran, B. (2010). Community-based participatory research contributions to intervention research: The intersection of science and practice to improve health equity. *American Journal of Public Health, 100*(SUPPL. 1), 40–46. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2009.184036>
- Windari, W. (2021). Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Lokal Berbasis Produksi Di Pedesaan. *Jurnal Agirekstensia, 20*(1), 90–106.
- Yahya, A. H. (2024). *Buku 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tolitoli Tahun 2024* (BappedaTolitoli (ed.)). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.